



PUTUSAN

Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Firmansyah
Tempat lahir	: Luwuk
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun / 18 Oktober 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegara	: Indonesia
an	: Perumahan Pelangi Regency Blok B No.
Tempat tinggal	08 RT 003 RW009 Kel. Ampang Kec.
	: Kuranji Kota Padang Sumatera Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Direktur PT. Mekateknika Laju Sejahtera
Pendidikan	S-2

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Mei 2022 Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 April 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 05 Januari 2022 Nomor Reg.Perkara : PDS-01/Ft.2/Pdang/01/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Firmansyah selaku Direktur PT. Mekateknika Laju Sejahtera dengan alamat Perumahan Pelangi Regency Blok B No.08 RT.003 RW.009 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang Sumatera Barat Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Usaha kontraktor di bidang kontruksi dan Pabrikasi mesin-mesin industri, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP (KPP) Pratama Padang Satu sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3729KT/WPJ.27/KP.0403/2016 tanggal 11 April 2016 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : S-442PKP/WPJ.27/KP.0403/2016 tanggal 14 November 2016 antara bulan April Tahun 2018 s/d bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu Jalan Bagindo Aziz Chan No. 20 Padang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu terdakwa telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak bulan April 2018, Mei 2018 dan Agustus 2018 sebesar Rp 98.768.862.- dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak bulan Januari 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 211.480.668), tetapi setelah terdakwa memotong atau memungut PPN tersebut, terdakwa tidak menyetorkan ke Kas Negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 310.249.530.- (tiga ratus sepuluh juta, dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah),** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 terdakwa mendirikan PT. Mekateknika Laju Sejahtera yang beralamat di Perumahan Pelangi Regency Blok B No 08 RT 003 RW 009 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang berdasarkan Akta Pendirian perusahaan oleh Notaris Muhammad Yus No. 52 tanggal 18 Desember 2015 dengan pengurus Terdakwa (Firmansyah) sebagai Direktur dan Darussalam sebagai Komisaris.

1. Bahwa PT. Mekateknika Laju Sejahtera terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Satu dengan NPWP 75.748.826.7-201.000 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3729KT/WPJ.27/KP.0403/2016 tanggal 11 April 2016 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau kontrak dengan Terdakwa selaku direktur sebagai penanggung jawab dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-442PKP/WPJ.27/KP.0403/2016 tanggal 14 November 2016.

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun Pajak 2018 dan tahun 2019 yang dilaporkan oleh PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000, Wajib Pajak tidak menuliskan kegiatan usaha pada kolom isian kegiatan usaha/pekerjaan.
3. Bahwa Kewajiban Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera NPWP 75.748.826.7-201.000 pada KPP Pratama Padang Satu sesuai Surat Keterangan Terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3729KT/WPJ.27/KP.0403/ 2016 tanggal 11 April 2016 adalah PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPN.
4. Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Masa PPN bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember tahun 2018 An. PT. Mekateknika Laju Sejahtera NPWP 75.748.826.7-201.000 dan Surat Pemberitahuan Masa PPN bulan Oktober, November, Desember tahun 2019 adalah terdakwa selaku Direktur.
5. Bahwa dari tahun 2018 s/d tahun 2019 terdakwa selaku direktur PT. Mekateknika Laju Sejahtera melakukan perjanjian atau Perintah Kerja pemborongan dengan beberapa perusahaan yaitu :
 - PT. HAYATI PRATAMA MANDIRI, sesuai Perjanjian pekerjaan pembangunan Showroom PT Hayati Pratama Mandiri di kota Bukittinggi tanggal 23 Mei 2018.
 - PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sesuai SPK jasa pembuatan Hole Resapan dan SPK lainnya tahun 2018.
 - PT .Matahari Sakti sesuai dengan SPK pekerjaan Perawatan dan Perbaikan atau Gedung dan Pekerjaan Overhaoul Mesin tahun 2018.
 - PT. Semen Batu Raja (Persero) Tbk, sesuai Perjanjian pekerjaan Jasa Kontruksi Fasilitas Semen Curah 3 Site tahun 2018
6. Bahwa berdasarkan data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 terdapat Faktur Pajak keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada lawan transaksi yang belum disetorkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) oleh PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000, selama masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 yaitu :

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Urut	Faktur Pajak		Nama Lawan	PPN Rp.
	Nomor	Tanggal		
1	01000218514526 95	02-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	425.000
2	01000218514526 96	02-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	880.000
3	01000218514526 97	24-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	880.000
4	01000218514526 98	24-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	85.000
5	01000218514526 99	24-Apr-18	PT .Matahari Sakti	13.480.090
6	01000218514527 00	24-Apr-18	PT .Matahari Sakti	11.600.455
7	01000218514527 02	24-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	125.000
8	01000218514527 03	27-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	425.000
9	01000218514527 04	11-May-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	425.000
10	01000218514527 05	22-May-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	990.000
11	01000218514527 06	22-May-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	115.000
12	01000218514527 11	28-May-18	PT.Hayati Pratama M andiri	184.500.000
13	01000218514527 14	24-Aug-18	PT.Hayati Pratama M andiri	119.925.000
Jumlah				333.855.545

7. Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut sendiri oleh wajib Pajak PT. MEKATEKNIKA LAJU SEJAHTERA NPWP 75.748.826.7-201.000 sebesar Rp 333.855.545,- Dan **terdapat Pajak Masukan** yang diperoleh Wajib Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 berdasarkan Faktur Pajak PPN yang diterbitkan lawan transaksi pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak tetapi belum dikreditkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 235.086.683,- sehingga jumlah PPN yang harus disetorkan wajib pajak PT. Mekateknika Laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 pada Masa April 2018, Mei 2018, dan Agustus 2018 sebesar Rp 98.768.862.

8. Bahwa berdasarkan data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 terdapat Faktur Pajak keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada lawan transaksi yang belum disetorkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) oleh PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000, selama masa pajak Januari s/d September tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Faktur Pajak		Nama Lawan	PPN Rp.
	Nomor	Tanggal		
1.	01000319140532 39	08-Jan-19	PT Hayati Pratama Mandiri	119.925.000
2.	03000319140532 41	08-Jan-19	PT Semen Batu Raja (Persero) TBK	26.040.000
3.	03000319140532 42	24-Jan-19	PT Semen Batu Raja (Persero) TBK	26.040.000
4.	01000319140532 43	12-Mar-19	PT Hayati Pratama Mandiri	39.975.000
5.	01000319140532 44	12-Mar-19	PT Hayati Pratama Mandiri	62.800.000
6.	03000319140532 45	18-Mar-19	PT. Semen Batu Raja (Persero) TBK	30.380.000
7.	01000319140532 46	14-May-19	PT Hayati Pratama Mandiri	30.750.000
8.	03000319140532 48	22-May-19	PT Semen Batu Raja (Persero) TBK	199.800.000
9.	03000319140532 51	02-Sep-19	PT Semen Batu Raja (Persero) TBK	221.453.400
Jumlah				757.163.400

9. Bahwa jumlah seluruh penyerahan Wajib Pajak masa Januari 2019 s/d September 2019 adalah Rp 7.571.634.000 dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar Rp. 757.163.400.- dimana atas PPN terutang tersebut telah dipungut dan disetorkan oleh Pemungut PPN PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO) TBK sebesar Rp 503.713.400 sehingga terdapat PPN terutang yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan oleh Wajib Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 sebesar Rp 253.450.000.-.

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdapat Pajak Masukan yang diperoleh Wajib Pajak berdasarkan Faktur Pajak PPN yang diterbitkan lawan transaksi pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak tetapi belum dikreditkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 41.969.332 sehingga jumlah PPN yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 pada SPT Masa Januari tahun 2019 sampai dengan SPT Masa September tahun 2019 sebesar Rp. 211.480.668.-.
11. Bahwa tahun 2018 terhadap PPN yang telah dipungut Terdakwa sebesar Rp. 98.768.862 dan tahun 2019 sebesar Rp 211.480.668 dan PPN tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke Kas Negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 310.249.530.- (tiga ratus sepuluh juta, dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Firmansyah selaku Direktur PT. Mekateknika Laju Sejahtera dengan alamat Perumahan Pelangi Regency Blok B No.08 RT003 RW009 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang Sumatera Barat Kelompok Lapangan Usaha kontraktor di bidang kontruksi dan Pabrikasi mesin-mesin industri, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP (KPP) Pratama Padang Satu sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3729KT/WPJ.27/KP.0403/2016 tanggal 11 April 2016 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : S-442PKP/WPJ.27/KP.0403/2016 tanggal 14 November 2016 antara bulan April Tahun 2018 s/d bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu Jalan Bagindo Aziz Chan No. 20 Padang atau setidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak bulan April

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Mei 2018 dan Agustus 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak bulan Januari 2019 s/d September 2019 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 310.249.530.- (tiga ratus sepuluh juta, dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 terdakwa mendirikan PT. Mekateknika Laju Sejahtera yang beralamat di Perumahan Pelangi Regency Blok B No.08 RT.003 RW.009 kel. Ampang kec. Kuranji Kota Padang berdasarkan Akta Pendirian perusahaan oleh Notaris Muhammad Yus No. 52 tanggal 18 Desember 2015 dengan pengurus Terdakwa (Firmansyah) sebagai Direktur dan Darussalam sebagai Komisaris.

1. Bahwa PT. Mekateknika Laju Sejahtera terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Satu dengan NPWP 75.748.826.7-201.000 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3729KT/WPJ.27/KP.0403/ 2016 tanggal 11 April 2016 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama adalah: 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak terdakwa selaku direktur sebagai Penanggung Jawab dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-442PKP/WPJ.27/KP.0403/2016 tanggal 14 November 2016.
2. Bahwa Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2018 dan tahun 2019 yang dilaporkan oleh PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000, Wajib Pajak tidak menuliskan kegiatan usaha pada kolom isian kegiatan usaha/pekerjaan.
3. Bahwa Kewajiban Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera NPWP 75.748.826.7-201.000 pada KPP Pratama Padang Satu sesuai Surat Keterangan Terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3729KT/WPJ.27/KP.0403/ 2016 tanggal 11 April 2016 adalah PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPN.
4. Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Masa PPN bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember tahun 2018 An. PT. Mekateknika Laju Sejahtera NPWP 75.748.826.7-201.000 dan Surat Pemberitahuan Masa PPN bulan Oktober, November, Desember tahun 2019 adalah terdakwa selaku Direktur.

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari tahun 2018 s/d tahun 2019 terdakwa selaku direktur PT. Mekateknika Laju Sejahtera melakukan perjanjian atau Perintah Kerja pemborongan dengan beberapa perusahaan yaitu :
- PT Hayati Pratama Mandiri, sesuai Perjanjian pekerjaan pembangunan Showroom PT Hayati Pratama Mandiri di kota Bukittinggi tanggal 23 Mei 2018.
 - PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sesuai SPK jasa pembuatan Hole Resapan dan SPK lainnya tahun 2018.
 - PT .Matahari Sakti sesuai dengan SPK pekerjaan Perawatan dan Perbaikan atau Gedung dan Pekerjaan Overhaoul Mesin tahun 2018.
 - PT. Semen Batu Raja (Persero) Tbk, sesuai Perjanjian pekerjaan Jasa Kontruksi Fasilitas Semen Curah 3 Site tahun 2018
6. Bahwa berdasarkan data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 terdapat Faktur Pajak keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada lawan transaksi yang diterbitkan oleh PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000, selama masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 yaitu :

No Urut	Faktur Pajak		Nama Lawan	PPN Rp.
	Nomor	Tanggal		
1	010002185145 2695	02-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	425.000
2	010002185145 2696	02-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	880.000
3	010002185145 2697	24-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	880.000
4	010002185145 2698	24-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	85.000
5	010002185145 2699	24-Apr-18	PT .Matahari Sakti	13.480.090
6	010002185145 2700	24-Apr-18	PT .Matahari Sakti	11.600.455
7	010002185145 2702	24-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	125.000
8	010002185145 2703	27-Apr-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	425.000
9	010002185145 2704	11-May-18	PT .Japfa Comfeed Indonesia Tbk	425.000
10	010002185145	22-May-18	PT .Japfa Comfeed	990.000

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2705		Indonesia Tbk	
11	010002185145	22-May-18	PT .Japfa Comfeed	115.000
	2706		Indonesia Tbk	
12	010002185145	28-May-18	PT.Hayati Pratama Man	184.500.000
	2711		diri	
13	010002185145	24-Aug-18	PT.Hayati Pratama Man	119.925.000
	2714		diri	
Jumlah				333.855.545

7. Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut sendiri oleh wajib Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera NPWP 75.748.826.7-201.000 sebesar Rp 333.855.545 tersebut dan **terdapat Pajak Masukan** yang diperoleh Wajib Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 berdasarkan Faktur Pajak PPN yang diterbitkan lawan transaksi pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak tetapi belum dikreditkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 235.086.683.
8. Bahwa setelah terdakwa selaku Direktur PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000, mengeluarkan Faktur Pajak keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada lawan transaksi bulan April 2018, bulan Mei 2018 dan bulan Agustus 2018, terdakwa **tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak bulan April 2018, Mei 2018 dan Agustus 2018** pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.
9. Bahwa berdasarkan data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 terdapat Faktur Pajak keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada lawan transaksi selama masa pajak Januari s/d September tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Faktur Pajak		Nama Lawan	PPN Rp.
	Nomor	Tanggal		
1	010003191405 3239	08-Jan-19	PT Hayati Pratama Mandiri	119.925.000
2	030003191405 3241	08-Jan-19	PT. Semen Batu Raja (Persero) TBK	26.040.000
3	030003191405 3242	24-Jan-19	PT. Semen Batu Raja (Persero) TBK	26.040.000
4	010003191405 3243	12-Mar-19	PT Hayati Pratama Mandiri	39.975.000

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	010003191405 3244	12-Mar-19	PT Hayati Pratama Mandiri	62.800.000
6	030003191405 3245	18-Mar-19	PT Semen Batu Raja (P ersero) TBK	30.380.000
7	010003191405 3246	14-May-19	PT Hayati Pratama Mandiri	30.750.000
8	030003191405 3248	22-May-19	PT. Semen Batu Raja (Persero) TBK	199.800.000
9	030003191405 3251	02-Sep-19	PT. Semen Batu Raja (Persero) TBK	221.453.400
Jumlah				757.163.400

10. Bahwa setelah terdakwa selaku Direktur PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000, mengeluarkan Faktur Pajak keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada lawan transaksi bulan Januari s/d September 2019 tersebut, terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak bulan Januari s/d 2019 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.
11. Bahwa jumlah seluruh penyerahan Wajib Pajak masa Januari 2019 s/d September 2019 adalah Rp 7.571.634.000 dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar Rp 757.163.400.- dimana atas PPN terutang tersebut telah dipungut dan disetorkan oleh Pemungut PPN PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO) TBK sebesar Rp 503.713.400 sehingga terdapat PPN terutang yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan oleh Wajib Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 sebesar Rp 253.450.000.-.
12. Bahwa Terdapat Pajak Masukan yang diperoleh Wajib Pajak berdasarkan Faktur Pajak PPN yang diterbitkan lawan transaksi pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak tetapi belum dikreditkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 41.969.332 sehingga jumlah PPN yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak PT. Mekateknika Laju Sejahtera, NPWP 75.748.826.7-201.000 pada SPT Masa Januari tahun 2019 sampai dengan SPT Masa September tahun 2019 sebesar Rp 211.480.668.-.
13. Bahwa terhadap PPN yang telah dipungut Terdakwa tahun 2018 sebesar Rp. 98.768.862 dan tahun 2019 sebesar Rp. 211.480.668 dan tidak disampaikan melalui SPT PPN, sehingga dapat menimbulkan kerugian

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendapatan negara sebesar 310.249.530.- (tiga ratus sepuluh juta, dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-01/Ft.2/Pdang/01/2022 tanggal 16 Maret 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Firmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dakwaan kedua melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firmansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 620.499.060,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Bukti Penerimaan Elektronik Sigma Teknindo Padang Tahun Pajak 2019 Masa Pajak 02/02 Jenis SPT: SPT PPN dan PPnBM 1111 nomor bukti penerimaan elektronik 75477306472193029722 tanggal 29 Maret 2019
 2. Formulir 1111 PT Sigma Teknindo Padang masa 02 s.d. 02 – 2019 Pembetulan ke 0
 3. Formulir 1111 A2 PT Sigma Teknindo Padang masa 02 s.d. 02-

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 Pembetulan ke 0
4. Faktur Penjualan 0233/II/STP/PDG/19 tanggal 19/02/19
 5. Faktur Pajak nomor 010.003-19.07734514 tanggal 19 Februari 2019
 6. Penawaran harga pekerjaan air conditioner nomor 232-XII-SGT-PDG-18 tanggal 13 Desember 2018
 7. Rekening koran Sigma Teknindo Padang PT no. rekening 0321 691888 halaman 3 periode 31-01-19 s/d 28-02-19
 8. Rekening koran Sigma Teknindo Padang PT no. rekening 0321 691888 halaman 3 periode 31-03-19 s/d 30-04-19
 9. Surat Pengantar Barang nomor 090/SPB-SGT/II/PDG/19 tanggal 16/02/2019
 10. Faktur Pajak nomor 0100021964792342 tanggal 14-06-2019
 11. Faktur Pajak nomor 0100021964792418 tanggal 01-07-2019
 12. Nota tagihan invoice 01DAB190600001 tanggal 14 Juni 2019
 13. Nota tagihan invoice 01IAB190700007 tanggal 1 Juli 2019
 14. Bukti penerimaan elektornik SPT PPN dan PPnBM Tahun pajak 2019 Masa Pajak 06/06 nomor tanda terima 95803706417193027541
 15. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 06 s.d 06 – 2019 PT Gajah Unggul Internasional pembetulan 0
 16. Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN masa 06 s.d 06 – 2019 PT Gajah Unggul Internasional pembetulan 0
 17. Bukti penerimaan elektornik SPT PPN dan PPnBM Tahun pajak 2019 Masa Pajak 07/07 nomor tanda terima 94803116485193028931
 18. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 07 s.d 07 – 2019 PT Gajah Unggul Internasional pembetulan 0
 19. Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN masa 07 s.d 07 – 2019 PT Gajah Unggul Internasional pembetulan 0
 20. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452695 tanggal 02 April 2018
 21. Surat Perintah Kerja nomor 4050325354 tanggal 26 Maret 2018
 22. Bukti Barang Masuk nomor 5000249443 tanggal 03 April 2018
 23. Invoice nomor 018000047 tanggal 2 April 2018
 24. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452696 tanggal 02 April 2018
 25. Surat Perintah Kerja nomor 4050325348 tanggal 26 Maret 2018
 26. Bukti Barang Masuk nomor 5000249393 tanggal 03 April 2018
 27. Invoice nomor 018000046 tanggal 2 April 2018
 28. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452697 tanggal 24 April 2018
 29. Surat Perintah Kerja nomor 4050332781 tanggal 11 April 2018
 30. Bukti Barang Masuk nomor 5000327509 tanggal 25 April 2018
 31. Invoice nomor 018000053 tanggal 24 April 2018
 32. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452698 tanggal 24 April 2018
 33. Surat Perintah Kerja nomor 4050332654 tanggal 10 April 2018
 34. Bukti Barang Masuk nomor 5000327541 tanggal 25 April 2018
 35. Bukti Barang Masuk nomor 5000327543 tanggal 25 April 2018
 36. Invoice nomor 018000054 tanggal 24 April 2018
 37. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452702 tanggal 24 April 2018

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Perintah Kerja nomor 4050337275 tanggal 24 April 2018
39. Bukti Barang Masuk nomor 5000327476 tanggal 25 April 2018
40. Invoice nomor 018000057 tanggal 24 April 2018
41. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452703 tanggal 27 April 2018
42. Surat Perintah Kerja nomor 4050332821 tanggal 11 April 2018
43. Bukti Barang Masuk nomor 5000336126 tanggal 27 April 2018
44. Invoice nomor 018000047 tanggal 2 April 2018
45. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452704 tanggal 11 Mei 2018
46. Surat Perintah Kerja nomor 4050339690 tanggal 2 Mei 2018
47. Bukti Barang Masuk nomor 5000393946 tanggal 14 Mei 2018
48. Invoice nomor 018000068 tanggal 2 April 2018
49. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452705 tanggal 22 Mei 2018
50. Surat Perintah Kerja nomor 4050339663 tanggal 2 Mei 2018
51. Bukti Barang Masuk nomor 5000430988 tanggal 23 Mei 2018
52. Invoice nomor 018000068 tanggal 22 Mei 2018
53. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452706 tanggal 22 Mei 2018
54. Surat Perintah Kerja nomor 4050344994 tanggal 14 Mei 2018
55. Bukti Barang Masuk nomor 5000431049 tanggal 23 Mei 2018
56. Invoice nomor 018000069 tanggal 22 Mei 2018
57. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18040500558088 tanggal 05/04/2018
58. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 6 periode 31-03-18 s/d 30-04-18
59. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18050200719339 tanggal 02/05/2018
60. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 1 periode 30-04-18 s/d 31-05-18
61. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18050200720062 tanggal 02/05/2018
62. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 1 periode 30-04-18 s/d 31-05-18
63. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18051700712511 tanggal 17/05/2018
64. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 14 periode 30-04-18 s/d 31-05-18
65. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18052800763520 tanggal 28/05/2018
66. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 25 periode 30-04-18 s/d 31-05-18
67. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-3729KT/WPJ.27/KP.0403/2016
68. Akta Pendirian Nomor 52 Tanggal 18 Desember 2015
69. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Januari 2018
70. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Februari 2018
71. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Maret 2018
72. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Masa PPN) Masa Juni 2018
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT
74. Masa PPN) Masa Juli 2018
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT
75. Masa PPN) Masa September 2018
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT
76. Masa PPN) Masa Oktober 2018
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT
77. Masa PPN) Masa November 2018
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT
78. Masa PPN) Masa Desember 2018
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT
79. Masa PPN) Masa Oktober 2019
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT
80. Masa PPN) Masa November 2019
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT
81. Masa PPN) Masa Desember 2019
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan Tahun 2018
82. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan Tahun 2019
83. Surat Teguran Nomor ST-02743/WPJ.27/KP.0403/2019
84. Surat Teguran Nomor ST-02742/WPJ.27/KP.0403/2019
85. Surat Teguran Nomor ST-02744/WPJ.27/KP.0403/2019
86. Surat Teguran Nomor ST-02743/WPJ.27/KP.0403/2019
87. Surat Teguran Nomor ST-02742/WPJ.27/KP.0403/2019
88. Surat Teguran Nomor ST-02712/WPJ.27/KP.0403/2019
89. Surat Teguran Nomor ST-00017/WPJ.27/KP.0403/2020
90. Surat Teguran Nomor ST-00016/WPJ.27/KP.0403/2020
91. Surat Teguran Nomor ST-00015/WPJ.27/KP.0403/2020
92. Surat Teguran Nomor ST-00026/WPJ.27/KP.0403/2021
93. Surat Teguran Nomor ST-00025/WPJ.27/KP.0403/2021
94. Surat Teguran Nomor ST-00024/WPJ.27/KP.0403/2021
95. Surat Teguran Nomor ST-00023/WPJ.27/KP.0403/2021
96. Surat Teguran Nomor ST-00022/WPJ.27/KP.0403/2021
97. Surat Teguran Nomor ST-00028/WPJ.27/KP.0403/2021
98. Surat Teguran Nomor ST-00027/WPJ.27/KP.0403/2021
99. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019
100. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
SP2DK-8690/WPJ.27/KP.04/2020
101. Berita Acara atas SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019 tanggal 09
April 2019
102. Surat Tugas ST-388/WPJ.27/KP.04/2019
103. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Surat Tugas ST-340/WPJ.27/KP.04/2020
105. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-8690/WPJ.27/KP.04/2020
106. Undangan Konseling UND-84/WPJ.27/KP.04/2020
107. Berita Acara Konseling BA-314/WPJ.27/KP.0408/2020
108. Berita Acara Konseling BA-315/WPJ.27/KP.0408/2020
109. Tanda terima penyerahan dokumen
110. Surat PT. Mekateknika Laju Sejahtera No. 028/Dir-MTLS/XI/2020
111. Screenshot detil pelaporan SPT Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
112. Screenshot detil pelaporan SPT Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
113. Print out SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
114. Print out SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
115. Print out SPT Masa PPN Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember 2018 dari aplikasi SIDJP
116. Print out SPT Masa PPN Oktober, November, Desember 2019 dari aplikasi SIDJP
117. Akta Pendirian PT. Mekateknika Laju Sejahtera
118. Screenshot detil pemenuhan pembayaran Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
119. Screenshot detil pemenuhan pembayaran Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
120. Scan Surat Teguran SPT Masa PPN Masa Pajak April, Mei dan Agustus 2018
121. Hasil cetak ulang Surat Teguran SPT Masa PPN Masa Januari s.d. September 2019
122. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019
123. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-8690/WPJ.27/KP.04/2020
124. Berita Acara atas SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019 tanggal 09 April 2019
125. Surat Tugas ST-388/WPJ.27/KP.04/2019
126. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019
127. Surat Tugas ST-340/WPJ.27/KP.04/2020

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-8690/WPJ.27/KP.04/2020
129. Undangan Konseling UND-84/WPJ.27/KP.04/2020
130. Berita Acara Konseling BA-314/WPJ.27/KP.0408/2020
131. Berita Acara Konseling BA-315/WPJ.27/KP.0408/2020
132. Tanda terima penyerahan dokumen
133. Surat PT. Mekateknika Laju Sejahtera No. 028/Dir-MTLS/XI/2020
134. Screenshot detil pelaporan SPT Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
135. Screenshot detil pelaporan SPT Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
136. Print out SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
137. Print out SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
138. Print out SPT Masa PPN Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember 2018 dari aplikasi SIDJP
139. Print out SPT Masa PPN Oktober, November, Desember 2019 dari aplikasi SIDJP
140. Akta Pendirian PT. Mekateknika Laju Sejahtera
141. Screenshot detil pemenuhan pembayaran Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
142. Screenshot detil pemenuhan pembayaran Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
143. Scan Surat Teguran SPT Masa PPN Masa Pajak April, Mei dan Agustus 2018
144. Hasil cetak ulang Surat Teguran SPT Masa PPN Masa Januari s.d. September 2019
145. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452711 tanggal 28 Mei 2018
146. Faktur Pajak nomor 010.003-19.14053246 tanggal 14 Mei 2019
147. Faktur Pajak nomor 010.003-19.14053243 tanggal 12 Maret 2019
148. Faktur Pajak nomor 010.003-19.14053244 tanggal 12 Maret 2019
149. Faktur Pajak nomor 010.003-19.14053239 tanggal 08 Maret 2019
150. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452714 tanggal 24 Agustus 2018
151. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya
152. Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 23 Mei 2018 antara PT Hayati Pratama Mandiri dengan PT. Mekateknika Laju Sejahtera
153. Screenshoot Email Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan PPnBM 1111 tahun pajak 2018 masa pajak 05/05 nomor tanda terima elektronik 33713606464184729200
154. Bukti Penerimaan Negara a.n. HAYATI PRATAMA MANDIRI

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP : 74.422.671.3-201.000 NTPN 170313IQ8JO1EI86
155. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 05 s.d. 05 – 2018 PT Hayati
Pratama Mandiri pembetulan 0
156. Screenshoot Email Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan
PPnBM 1111 tahun pajak 2018 masa pajak 08/08 nomor tanda
terima elektronik 50713906406184729221
157. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 08 s.d. 08 – 2018 PT Hayati
Pratama Mandiri pembetulan 0
158. Screenshoot Email Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan
PPnBM 1111 tahun pajak 2019 masa pajak 01/01 nomor tanda
terima elektronik 05713206419194728501
159. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 01 s.d. 01 – 2019 PT Hayati
Pratama Mandiri pembetulan 0
160. Screenshoot Email Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan
PPnBM 1111 tahun pajak 2019 masa pajak 03/03 nomor tanda
terima elektronik 93713406457194730622
161. Bukti Penerimaan Negara a.n. HAYATI PRATAMA MANDIRI
NPWP : 74.422.671.3-201.000 NTPN DDD486SETSBEUOT6
162. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 03 s.d. 03 – 2019 PT Hayati
Pratama Mandiri pembetulan 0
163. Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan PPnBM 1111 tahun
pajak 2019 masa pajak 05/05 nomor tanda terima elektronik
74713706442194701411
164. Bukti Penerimaan Negara a.n. HAYATI PRATAMA MANDIRI
NPWP : 74.422.671.3-201.000 NTPN A36712V1UF4D2CNM
165. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 05 s.d. 05 – 2019 PT Hayati
Pratama Mandiri pembetulan 0
166. Print Out transfer dana ke rekening BCA Lainnya dan kwitansi
pembayaran dari PT Hayati Pratama Mandiri
167. SPK (Addendum) 001/SPK/GSW-IST/XII/2018 tanggal 18
Desember 2018
168. Print Out rekening koran No. rekening 1630517172 periode 31-
12-18 s.d. 31-01-19
169. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 034/SPP-
PPSH/HPM/II/2019
170. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000415/CV/05-2018
tanggal 31-May-18, kwitansi, Purchase request 00115/PR/V/2018
tanggal 29/05/2018, Purchase Order 018000072B tanggal 26 Mei
2018, NPWP, Invoice 018000072 tanggal 28-Mei-18, Faktur Pajak
010.002-18.51452711 tanggal 28 Mei 2018
171. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000337/CV/08-2018
tanggal 28-AUG-18, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29/05/2018, kwitansi, Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2018, Dokumentasi pelaksanaan minggu ke 13 (tiga belas), Surat Permohonan Termyn I sebesar 30% No. 031/LKP-SHOWROOM/HYT/VIII/2018, Invoice 018000093 tanggal 24 Agustus 2018, Faktur Pajak 010.002-18.51452714 tanggal 24 Agustus 2018
172. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000017/CV/10-2018 tanggal 02-OCT-18, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, kwitansi, Laporan kemajuan Pekerjaan Nomor 061/LKP-SHOWROOM/HYT/IX/2018 tanggal 30 September 2018, Bukti Pengeluaran Bank Doc No. 000000358/CV/09-2018 tanggal 25-SEP-18, Invoice 018000107 tanggal 01-Okt-18, Faktur Pajak 010.002-18.51452715 tanggal 01 Oktober 2018, Surat Permohonan Termyn II sebesar 60% No. 0161/LKP-SHR/HYT/IX/2018
173. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000358/CV/09-2018 tanggal 25-SEP-18, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, Surat Permohonan tanggal 22 September 2018, Screenshot percakapan
174. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000217/CV/11-2018 tanggal 15-NOV-18, Print Out transfer dana ke rekening BCA Lainnya ref : 18111500202971, Surat Permohonan tanggal 14 November 2018, Material Onsite (MOS), Screenshot percakapan, rekap laporan mingguan
175. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000047/CV/01-2019 tanggal 08-JAN-19, kwitansi, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, Surat Permohonan Termyn III sebesar 90%, Invoice 019000003 tanggal 08-Jan-19, Faktur Pajak 010.003-19.14053239 tanggal 08 Januari 2019, Laporan kemajuan pekerjaan Nomor 062/LKP-SHOWROOM/HYT/IX/2018 tanggal 5 Januari 2019, Dokumentasi Pelaksanaan Minggu ke 31 (tiga puluh satu), Dokumentasi Pelaksanaan Minggu ke 32 (tiga puluh dua)
176. Bukti pengeluaran bank 0051/CV/03-2019 tanggal 12-Mar-19, invoice 0190000010 tanggal 12-Mar-19, Faktur Pajak 010.003-19.14053244 tanggal 12 Maret 2019,
177. Bukti pengeluaran bank 0050/CV/03-2019 tanggal 12-Mar-19, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, kwitansi dan Bukti pengeluaran bank 000000235/CV/01-2019 tanggal 22-

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAN-19, Faktur Pajak 010.003-19.14053243 tanggal 12 Maret 2019, Invoice 019000009 tanggal 12-Mar-19, Berita acara hasil pemeriksaan Nomor 034/SPP-PPSH/HPM/II/2019
178. Bukti pengeluaran bank 000000112/CV/05-2019 tanggal 16-May-19, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, kwitansi, Invoice No. 0190000012 tanggal 14-Mei-19, Faktur Pajak 010.003-19.14053246 tanggal 14 Mei 2019
179. Bukti pengeluaran bank 000000162/CV/04-2019 tanggal 30-APR-19, Surat Permohonan tanggal 26 April 2018, Screenshot percakapan
180. Bukti pengeluaran bank 000000235/CV/01-2019 tanggal 22-JAN-19, Surat Permohonan tanggal 21 Januari 2019
181. Surat Perjanjian Jasa Nomor HK.01.17/130 A/2018 antara PT Semen Baturaja (Persero) TBK dengan PT. Mekateknika Laju Sejahtera tentang Jasa Konstruksi Fasilitas Semen Curah 3 site
182. Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor HK.01.17/130 A/2018 antara PT Semen Baturaja (Persero) TBK dengan PT. Mekateknika Laju Sejahtera tentang Jasa Konstruksi Fasilitas Semen Curah 3 site
183. Kesepakatan pengakhiran perjanjian Nomor Surat Perjanjian Jasa Nomor HK.01.17/130 A/2018 antara PT Semen Baturaja (Persero) TBK dengan PT. Mekateknika Laju Sejahtera tentang Jasa Konstruksi Fasilitas Semen Curah 3 site
184. Faktur pajak Nomor 030.002-18.51452723 tanggal 21 November 2018
185. Faktur pajak Nomor 030.002-19.14053241 tanggal 08 Januari 2019
186. Faktur pajak Nomor 030.003-19.14053242 tanggal 24 Januari 2019
187. Faktur pajak Nomor 030.003-19.14053245 tanggal 18 Maret 2019
188. Faktur pajak Nomor 030.003-19.14053248 tanggal 22 Mei 2019
189. Faktur pajak Nomor 030.003-19.14053251 tanggal 02 September 2019
190. Surat setoran pajak 411211-900
191. Formulir 1111 B2SPT Masa PPN daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri
192. Invoice Nomor 018000061 tanggal 24 April 2018
193. Faktur pajak Nomor 010.002-18.51452700 tanggal 24 April 2018
194. Cek Nomor DV 580382 tanggal 14-5-2018 dan Bukti Penyerahan Pembayaran
195. Bukti pemotongan/pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000006/V/PPH4AYAT2/MS/2018 tanggal 22 Mei 2018
196. Surat Perintah Kerja No. 002/SPK/AR/MS/IX/2017 tanggal 1

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017

197. Invoice Nomor : 018000060 tanggal 24 april 2018
198. Faktur pajak Nomor 010.002-18.51452699 tanggal 24 April 2018
199. Cek Nomor DV 58033 tanggal 11-05-2018 dan Bukti Penyerahan

Pembayaran

200. Bukti pemotongan/pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000003/V/PPH4AYAT2/MS/2018 tanggal 11 Mei 2018
201. Surat Perintah Kerja No. 001/SPK/AR/MS/VIII/2017 tanggal 9

Agustus 2017

202. Rekening Tahapan BCA KCU Padang nomor rekening 0321480488 An. Firmansyah periode Januari s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019
203. Rekening Giro BCA KCP Pemuda nomor rekening 1630750888 An. PT. Mekateknika Laju Sejahtera periode Agustus s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019
204. Rekening Giro BCA KCP Pondok nomor rekening 6165980488 An. An. PT. Mekateknika Laju Sejahtera periode Januari s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Padang telah menjatuhkan putusan pada tanggal , Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 620.499.060,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Bukti Penerimaan Elektronik Sigma Teknindo Padang Tahun Pajak 2019 Masa Pajak 02/02 Jenis SPT: SPT PPN dan PPNBM 1111 nomor bukti penerimaan elektronik 75477306472193029722 tanggal 29 Maret 2019

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Formulir 1111 PT Sigma Teknindo Padang masa 02 s.d. 02 – 2019 Pembetulan ke 0
3. Formulir 1111 A2 PT Sigma Teknindo Padang masa 02 s.d. 02- 2019 Pembetulan ke 0
4. Faktur Penjualan 0233/II/STP/PDG/19 tanggal 19/02/19
5. Faktur Pajak nomor 010.003-19.07734514 tanggal 19 Februari 2019
6. Penawaran harga pekerjaan air conditioner nomor 232-XII-SGT- PDG-18 tanggal 13 Desember 2018
7. Rekening koran Sigma Teknindo Padang PT no. rekening 0321 691888 halaman 3 periode 31-01-19 s/d 28-02-19
8. Rekening koran Sigma Teknindo Padang PT no. rekening 0321 691888 halaman 3 periode 31-03-19 s/d 30-04-19
9. Surat Pengantar Barang nomor 090/SPB-SGT/II/PDG/19 tanggal 16/02/2019
10. Faktur Pajak nomor 0100021964792342 tanggal 14-06-2019
11. Faktur Pajak nomor 0100021964792418 tanggal 01-07-2019
12. Nota tagihan invoice 01DAB190600001 tanggal 14 Juni 2019
13. Nota tagihan invoice 01IAB190700007 tanggal 1 Juli 2019
14. Bukti penerimaan elektornik SPT PPN dan PPnBM Tahun pajak 2019 Masa Pajak 06/06 nomor tanda terima 95803706417193027541
15. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 06 s.d 06 – 2019 PT Gajah Unggul Internasional pembetulan 0
16. Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN masa 06 s.d 06 – 2019 PT Gajah Unggul Internasional pembetulan 0
17. Bukti penerimaan elektornik SPT PPN dan PPnBM Tahun pajak 2019 Masa Pajak 07/07 nomor tanda terima 94803116485193028931
18. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 07 s.d 07 – 2019 PT Gajah Unggul Internasional pembetulan 0
19. Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN masa 07 s.d 07 – 2019 PT Gajah Unggul Internasional pembetulan 0
20. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452695 tanggal 02 April 2018
21. Surat Perintah Kerja nomor 4050325354 tanggal 26 Maret 2018
22. Bukti Barang Masuk nomor 5000249443 tanggal 03 April 2018
23. Invoice nomor 018000047 tanggal 2 April 2018
24. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452696 tanggal 02 April 2018
25. Surat Perintah Kerja nomor 4050325348 tanggal 26 Maret 2018
26. Bukti Barang Masuk nomor 5000249393 tanggal 03 April 2018
27. Invoice nomor 018000046 tanggal 2 April 2018
28. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452697 tanggal 24 April 2018
29. Surat Perintah Kerja nomor 4050332781 tanggal 11 April 2018
30. Bukti Barang Masuk nomor 5000327509 tanggal 25 April 2018
31. Invoice nomor 018000053 tanggal 24 April 2018
32. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452698 tanggal 24 April 2018
33. Surat Perintah Kerja nomor 4050332654 tanggal 10 April 2018

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti Barang Masuk nomor 5000327541 tanggal 25 April 2018
35. Bukti Barang Masuk nomor 5000327543 tanggal 25 April 2018
36. Invoice nomor 018000054 tanggal 24 April 2018
37. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452702 tanggal 24 April 2018
38. Surat Perintah Kerja nomor 4050337275 tanggal 24 April 2018
39. Bukti Barang Masuk nomor 5000327476 tanggal 25 April 2018
40. Invoice nomor 018000057 tanggal 24 April 2018
41. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452703 tanggal 27 April 2018
42. Surat Perintah Kerja nomor 4050332821 tanggal 11 April 2018
43. Bukti Barang Masuk nomor 5000336126 tanggal 27 April 2018
44. Invoice nomor 018000047 tanggal 2 April 2018
45. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452704 tanggal 11 Mei 2018
46. Surat Perintah Kerja nomor 4050339690 tanggal 2 Mei 2018
47. Bukti Barang Masuk nomor 5000393946 tanggal 14 Mei 2018
48. Invoice nomor 018000068 tanggal 2 April 2018
49. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452705 tanggal 22 Mei 2018
50. Surat Perintah Kerja nomor 4050339663 tanggal 2 Mei 2018
51. Bukti Barang Masuk nomor 5000430988 tanggal 23 Mei 2018
52. Invoice nomor 018000068 tanggal 22 Mei 2018
53. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452706 tanggal 22 Mei 2018
54. Surat Perintah Kerja nomor 4050344994 tanggal 14 Mei 2018
55. Bukti Barang Masuk nomor 5000431049 tanggal 23 Mei 2018
56. Invoice nomor 018000069 tanggal 22 Mei 2018
57. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18040500558088 tanggal 05/04/2018
58. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 6 periode 31-03-18 s/d 30-04-18
59. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18050200719339 tanggal 02/05/2018
60. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 1 periode 30-04-18 s/d 31-05-18
61. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18050200720062 tanggal 02/05/2018
62. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 1 periode 30-04-18 s/d 31-05-18
63. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18051700712511 tanggal 17/05/2018
64. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 14 periode 30-04-18 s/d 31-05-18
65. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya No. Referensi 18052800763520 tanggal 28/05/2018
66. Rekening Giro Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT no. rekening 6165277779 halaman 25 periode 30-04-18 s/d 31-05-18
67. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-3729KT/WPJ.27/KP.0403/2016
68. Akta Pendirian Nomor 52 Tanggal 18 Desember 2015
69. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Januari 2018
70. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa PPN) Masa Februari 2018

71. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Maret 2018
72. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Juni 2018
73. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Juli 2018
74. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa September 2018
75. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Oktober 2018
76. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa November 2018
77. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Desember 2018
78. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Oktober 2019
79. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa November 2019
80. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Masa Desember 2019
81. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2018
82. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2019
83. Surat Teguran Nomor ST-02743/WPJ.27/KP.0403/2019
84. Surat Teguran Nomor ST-02742/WPJ.27/KP.0403/2019
85. Surat Teguran Nomor ST-02744/WPJ.27/KP.0403/2019
86. Surat Teguran Nomor ST-02743/WPJ.27/KP.0403/2019
87. Surat Teguran Nomor ST-02742/WPJ.27/KP.0403/2019
88. Surat Teguran Nomor ST-02712/WPJ.27/KP.0403/2019
89. Surat Teguran Nomor ST-00017/WPJ.27/KP.0403/2020
90. Surat Teguran Nomor ST-00016/WPJ.27/KP.0403/2020
91. Surat Teguran Nomor ST-00015/WPJ.27/KP.0403/2020
92. Surat Teguran Nomor ST-00026/WPJ.27/KP.0403/2021
93. Surat Teguran Nomor ST-00025/WPJ.27/KP.0403/2021
94. Surat Teguran Nomor ST-00024/WPJ.27/KP.0403/2021
95. Surat Teguran Nomor ST-00023/WPJ.27/KP.0403/2021
96. Surat Teguran Nomor ST-00022/WPJ.27/KP.0403/2021
97. Surat Teguran Nomor ST-00028/WPJ.27/KP.0403/2021
98. Surat Teguran Nomor ST-00027/WPJ.27/KP.0403/2021
99. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019
100. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-8690/WPJ.27/KP.04/2020
101. Berita Acara atas SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019 tanggal 09

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019

102. Surat Tugas ST-388/WPJ.27/KP.04/2019
103. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019
104. Surat Tugas ST-340/WPJ.27/KP.04/2020
105. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-8690/WPJ.27/KP.04/2020
106. Undangan Konseling UND-84/WPJ.27/KP.04/2020
107. Berita Acara Konseling BA-314/WPJ.27/KP.0408/2020
108. Berita Acara Konseling BA-315/WPJ.27/KP.0408/2020
109. Tanda terima penyerahan dokumen
110. Surat PT. Mekateknika Laju Sejahtera No. 028/Dir-MTLS/XI/2020
111. Screenshot detil pelaporan SPT Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
112. Screenshot detil pelaporan SPT Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
113. Print out SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
114. Print out SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
115. Print out SPT Masa PPN Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember 2018 dari aplikasi SIDJP
116. Print out SPT Masa PPN Oktober, November, Desember 2019 dari aplikasi SIDJP
117. Akta Pendirian PT. Mekateknika Laju Sejahtera
118. Screenshot detil pemenuhan pembayaran Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
119. Screenshot detil pemenuhan pembayaran Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
120. Scan Surat Teguran SPT Masa PPN Masa Pajak April, Mei dan Agustus 2018
121. Hasil cetak ulang Surat Teguran SPT Masa PPN Masa Januari s.d. September 2019
122. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019
123. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-8690/WPJ.27/KP.04/2020
124. Berita Acara atas SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019 tanggal 09 April 2019

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Surat Tugas ST-388/WPJ.27/KP.04/2019
126. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-962/WPJ.27/KP.04/2019
127. Surat Tugas ST-340/WPJ.27/KP.04/2020
128. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan SP2DK-8690/WPJ.27/KP.04/2020
129. Undangan Konseling UND-84/WPJ.27/KP.04/2020
130. Berita Acara Konseling BA-314/WPJ.27/KP.0408/2020
131. Berita Acara Konseling BA-315/WPJ.27/KP.0408/2020
132. Tanda terima penyerahan dokumen
133. Surat PT. Mekateknika Laju Sejahtera No. 028/Dir-MTLS/XI/2020
134. Screenshot detil pelaporan SPT Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
135. Screenshot detil pelaporan SPT Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
136. Print out SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
137. Print out SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
138. Print out SPT Masa PPN Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember 2018 dari aplikasi SIDJP
139. Print out SPT Masa PPN Oktober, November, Desember 2019 dari aplikasi SIDJP
140. Akta Pendirian PT. Mekateknika Laju Sejahtera
141. Screenshot detil pemenuhan pembayaran Tahun Pajak 2018 dari aplikasi SIDJP
142. Screenshot detil pemenuhan pembayaran Tahun Pajak 2019 dari aplikasi SIDJP
143. Scan Surat Teguran SPT Masa PPN Masa Pajak April, Mei dan Agustus 2018
144. Hasil cetak ulang Surat Teguran SPT Masa PPN Masa Januari s.d. September 2019
145. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452711 tanggal 28 Mei 2018
146. Faktur Pajak nomor 010.003-19.14053246 tanggal 14 Mei 2019
147. Faktur Pajak nomor 010.003-19.14053243 tanggal 12 Maret 2019
148. Faktur Pajak nomor 010.003-19.14053244 tanggal 12 Maret 2019
149. Faktur Pajak nomor 010.003-19.14053239 tanggal 08 Maret 2019
150. Faktur Pajak nomor 010.002-18.51452714 tanggal 24 Agustus 2018
151. Print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya
152. Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 23 Mei 2018 antara PT Hayati

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama Mandiri dengan PT. Mekateknika Laju Sejahtera
153. Screenshoot Email Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan PPnBM 1111 tahun pajak 2018 masa pajak 05/05 nomor tanda terima elektronik 33713606464184729200
154. Bukti Penerimaan Negara a.n. HAYATI PRATAMA MANDIRI NPWP : 74.422.671.3-201.000 NTPN 170313IQ8JO1EI86
155. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 05 s.d. 05 – 2018 PT Hayati Pratama Mandiri pembetulan 0
156. Screenshoot Email Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan PPnBM 1111 tahun pajak 2018 masa pajak 08/08 nomor tanda terima elektronik 50713906406184729221
157. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 08 s.d. 08 – 2018 PT Hayati Pratama Mandiri pembetulan 0
158. Screenshoot Email Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan PPnBM 1111 tahun pajak 2019 masa pajak 01/01 nomor tanda terima elektronik 05713206419194728501
159. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 01 s.d. 01 – 2019 PT Hayati Pratama Mandiri pembetulan 0
160. Screenshoot Email Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan PPnBM 1111 tahun pajak 2019 masa pajak 03/03 nomor tanda terima elektronik 93713406457194730622
161. Bukti Penerimaan Negara a.n. HAYATI PRATAMA MANDIRI NPWP : 74.422.671.3-201.000 NTPN DDD486SETSBEUOT6
162. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 03 s.d. 03 – 2019 PT Hayati Pratama Mandiri pembetulan 0
163. Bukti penerimaan elektronik SPT PPN dan PPnBM 1111 tahun pajak 2019 masa pajak 05/05 nomor tanda terima elektronik 74713706442194701411
164. Bukti Penerimaan Negara a.n. HAYATI PRATAMA MANDIRI NPWP : 74.422.671.3-201.000 NTPN A36712V1UF4D2CNM
165. Formulir 1111 SPT Masa PPN masa 05 s.d. 05 – 2019 PT Hayati Pratama Mandiri pembetulan 0
166. Print Out transfer dana ke rekening BCA Lainnya dan kwitansi pembayaran dari PT Hayati Pratama Mandiri
167. SPK (Addendum) 001/SPK/GSW-IST/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
168. Print Out rekening koran No. rekening 1630517172 periode 31-12-18 s.d. 31-01-19
169. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 034/SPP-PPSH/HPM/II/2019
170. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000415/CV/05-2018 tanggal 31-May-18, kwitansi, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, Purchase Order 018000072B tanggal 26 Mei

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, NPWP, Invoice 018000072 tanggal 28-Mei-18, Faktur Pajak 010.002-18.51452711 tanggal 28 Mei 2018
171. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000337/CV/08-2018 tanggal 28-AUG-18, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, kwitansi, Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2018, Dokumentasi pelaksanaan minggu ke 13 (tiga belas), Surat Permohonan Termyn I sebesar 30% No. 031/LKP-SHOWROOM/HYT/VIII/2018, Invoice 018000093 tanggal 24 Agustus 2018, Faktur Pajak 010.002-18.51452714 tanggal 24 Agustus 2018
172. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000017/CV/10-2018 tanggal 02-OCT-18, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, kwitansi, Laporan kemajuan Pekerjaan Nomor 061/LKP-SHOWROOM/HYT/IX/2018 tanggal 30 September 2018, Bukti Pengeluaran Bank Doc No. 000000358/CV/09-2018 tanggal 25-SEP-18, Invoice 018000107 tanggal 01-Okt-18, Faktur Pajak 010.002-18.51452715 tanggal 01 Oktober 2018, Surat Permohonan Termyn II sebesar 60% No. 0161/LKP-SHR/HYT/IX/2018
173. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000358/CV/09-2018 tanggal 25-SEP-18, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, Surat Permohonan tanggal 22 September 2018, Screenshot percakapan
174. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000217/CV/11-2018 tanggal 15-NOV-18, Print Out transfer dana ke rekening BCA Lainnya ref : 18111500202971, Surat Permohonan tanggal 14 November 2018, Material Onsite (MOS), Screenshot percakapan, rekap laporan mingguan
175. Bukti pengeluaran bank Doc. No : 000000047/CV/01-2019 tanggal 08-JAN-19, kwitansi, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, Surat Permohonan Termyn III sebesar 90%, Invoice 019000003 tanggal 08-Jan-19, Faktur Pajak 010.003-19.14053239 tanggal 08 Januari 2019, Laporan kemajuan pekerjaan Nomor 062/LKP-SHOWROOM/HYT/IX/2018 tanggal 5 Januari 2019, Dokumentasi Pelaksanaan Minggu ke 31 (tiga puluh satu), Dokumentasi Pelaksanaan Minggu ke 32 (tiga puluh dua)
176. Bukti pengeluaran bank 0051/CV/03-2019 tanggal 12-Mar-19, invoice 0190000010 tanggal 12-Mar-19, Faktur Pajak 010.003-

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.14053244 tanggal 12 Maret 2019,

177. Bukti pengeluaran bank 0050/CV/03-2019 tanggal 12-Mar-19, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, kwitansi dan Bukti pengeluaran bank 000000235/CV/01-2019 tanggal 22-JAN-19, Faktur Pajak 010.003-19.14053243 tanggal 12 Maret 2019, Invoice 019000009 tanggal 12-Mar-19, Berita acara hasil pemeriksaan Nomor 034/SPP-PPSH/HPM/II/2019
178. Bukti pengeluaran bank 000000112/CV/05-2019 tanggal 16-May-19, Purchase request 00115/PR/V/2018 tanggal 29/05/2018, kwitansi, Invoice No. 0190000012 tanggal 14-Mei-19, Faktur Pajak 010.003-19.14053246 tanggal 14 Mei 2019
179. Bukti pengeluaran bank 000000162/CV/04-2019 tanggal 30-APR-19, Surat Permohonan tanggal 26 April 2018, Screenshot percakapan
180. Bukti pengeluaran bank 000000235/CV/01-2019 tanggal 22-JAN-19, Surat Permohonan tanggal 21 Januari 2019
181. Surat Perjanjian Jasa Nomor HK.01.17/130 A/2018 antara PT Semen Baturaja (Persero) TBK dengan PT. Mekateknika Laju Sejahtera tentang Jasa Konstruksi Fasilitas Semen Curah 3 site
182. Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor HK.01.17/130 A/2018 antara PT Semen Baturaja (Persero) TBK dengan PT. Mekateknika Laju Sejahtera tentang Jasa Konstruksi Fasilitas Semen Curah 3 site
183. Kesepakatan pengakhiran perjanjian Nomor Surat Perjanjian Jasa Nomor HK.01.17/130 A/2018 antara PT Semen Baturaja (Persero) TBK dengan PT. Mekateknika Laju Sejahtera tentang Jasa Konstruksi Fasilitas Semen Curah 3 site
184. Faktur pajak Nomor 030.002-18.51452723 tanggal 21 November 2018
185. Faktur pajak Nomor 030.002-19.14053241 tanggal 08 Januari 2019
186. Faktur pajak Nomor 030.003-19.14053242 tanggal 24 Januari 2019
187. Faktur pajak Nomor 030.003-19.14053245 tanggal 18 Maret 2019
188. Faktur pajak Nomor 030.003-19.14053248 tanggal 22 Mei 2019
189. Faktur pajak Nomor 030.003-19.14053251 tanggal 02 September 2019
190. Surat setoran pajak 411211-900
191. Formulir 1111 B2SPT Masa PPN daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri
192. Invoice Nomor 018000061 tanggal 24 April 2018
193. Faktur pajak Nomor 010.002-18.51452700 tanggal 24 April 2018

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Cek Nomor DV 580382 tanggal 14-5-2018 dan Bukti Penyerahan Pembayaran
195. Bukti pemotongan/pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000006/V/PPH4AYAT2/MS/2018 tanggal 22 Mei 2018
196. Surat Perintah Kerja No. 002/SPK/AR/MS/IX/2017 tanggal 1 September 2017
197. Invoice Nomor : 018000060 tanggal 24 april 2018
198. Faktur pajak Nomor 010.002-18.51452699 tanggal 24 April 2018
199. Cek Nomor DV 58033 tanggal 11-05-2018 dan Bukti Penyerahan Pembayaran
200. Bukti pemotongan/pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000003/V/PPH4AYAT2/MS/2018 tanggal 11 Mei 2018
201. Surat Perintah Kerja No. 001/SPK/AR/MS/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017
202. Rekening Tahapan BCA KCU Padang nomor rekening 0321480488 An. Firmansyah periode Januari s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019
203. Rekening Giro BCA KCP Pemuda nomor rekening 1630750888 An. PT. Mekateknika Laju Sejahtera periode Agustus s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019
204. Rekening Giro BCA KCP Pondok nomor rekening 6165980488 An. An. PT. Mekateknika Laju Sejahtera periode Januari s/d Desember 2018 dan Januari s/d Desember 2019

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2022/PN PDG dan 34/ Akta.Pid/2022/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pdg, tanggal 20 April 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 April 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Panitera Pengadilan Negeri Padang, masing-masing pada tanggal 17 Mei

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 April 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan kesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 20 April 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dakwaan kedua melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 April 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami : **H. Yulman, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **Inang Kasmawati, S.H.** dan **Syaifoni, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Inang Kasmawati, S.H.**

H. Yulman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT PDG